EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DI KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT

Bagaskara Wahyu Oky Putra Sauwir
NPP. 30.1518
Asdaf Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat
Program Studi Keuangan Publik

Email: bagaselfath25@gmail.com
Pembimbing Skripsi : Arina Romarina, SE., M.Ec., Dev

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The Local Government Work Plan (LGWP) is part of the planning and budgeting process at the regional level. The LGWP has an important role in determining the direction of development policies in the regions as well as appropriate budget allocations to realize these goals. Therefore, evaluation of the LGWP is very important to ensure that planning and budgeting in the regions are effective and efficient. **Purpose:** The study intends to evaluate and describe the LGWP to find out consistency in the planning and budgeting documents of the Manokwari Regency government in 2022. **Method:** The research method used is qualitative with a descriptive approach and the Stufflebeam CIPP Evaluation Theory (Context, Input, Process, Product) as the theoretical basis of the research. In this study, primary data collection used data collection techniques through interviews with informants and observation of the research object, then for secondary data using documentation techniques. Analysis of the research data used techniques of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Result:** The results showed that the evaluation of the LGWP in planning and budgeting in Manokwari Regency, especially the Regional Development Planning Agency. **Conclusion:** First, the results of the LGWP evaluation in planning and budgeting were found to be inconsistent document. Second, the inhibiting factors in carrying out the LGWP evaluation are limited human resources, limited financial resources, lack of awareness and participation of stakeholders, technical constraints on information technology, and lack of coordination between agencies. Third, the government's efforts to overcome the inhibiting factors for LGWP evaluation, namely by improving the quality of human resources, increasing budget allocations for LGWP assessments, increasing stakeholder awareness and participation, increasing technology support, and increasing better coordination between agencies.

Keywords: Budgeting; Evaluation; Planning; LGWP

ABSTRAK (in bahasa)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan bagian dari proses perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah. RKPD memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di daerah serta alokasi anggaran yang sesuai untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, evaluasi RKPD menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran di daerah berjalan efektif dan efisien. **Tujuan:** Penelitian ini bermaksud untuk mengevaluasi dan mendiskripsikan RKPD untuk mengetahui konsistensi pada dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah Kabupaten Manokwari Tahun 2022. **Metode:** Metode Penelitian yang digunakan adalah Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif serta Teori Evaluasi Stufflebeam CIPP (Context,Input,Process,Product) sebagai landasan teori penelitian. Dalam penelitian ini pengumpulan data primer menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan narasumber dan observasi terhadap objek penelitian, selanjutnya pada data sekunder menggunakan teknik dokumentasi. Analisis data penelitian ini memakai teknik Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menampilkan bahwa Evaluasi RKPD dalam penyusunan Perencanaan dan Penganggaran di Kabupaten Manokwari Khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. **Kesimpulan:** Pertama, Dalam hasil evaluasi RKPD dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran didapati tidak konsistensinya dokumen. Kedua, faktor penghambat dalam pelaksaan evaluasi RKPD yaitu Sumber Daya Manusia yang terbatas, Sumber keuangan yang terbatas, kurangnya kesadaran dan partisipasi pemangku kepentingan, kendala teknis teknologi informasi, dan kurangnya kordinasi antar instansi. Ketiga, upaya pemerintah dalam mengatasi faktor penghambat evaluasi RKPD yaitu dengan meningkatkan kualitas Sumber daya manusia, peningkatan alokasi anggaran penilaian RKPD, peningkatan Kesadaran dan partisipasi pemangku kepentingan, peningkatan dukungan teknologi, dan peningkatan koordinasi antar instansi yang lebih baik.

Kata kunci: Evaluasi; Perencanaan; Penganggaran; RKPD

I. PENDAHULUAN (15-20%)

1.1. Latar Belakang

Meskipun otonomi daerah memberi kebebasan bagi daerah di dalam memenuhi kebutuhannya, kebutuhan daerah selalu disesuaikan dengan kepentingan nasional dan diatur dengan undang - aundang. Seperti halnya pemerintah pusat, pemerintah daerah juga melakukan penyusunan perencanaan dan pengelolaan anggaran di setiap tahunnya. sesuai Permendagri 13 Tahun 2006 pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk merencanakan pembangunan daerah termasuk tahapan dan tata cara penyusunan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang dituang didalam dokumen perencanaan daerah dan APBD.

Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah di Kabupaten Manokwari melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah untuk memastikan keselarasan antara kebijakan dan pelaksanaannya serta hasil rencana pembangunan daerah. Evaluasi ini meliputi penilaian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, baik kebijakan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan, serta pengevaluasian hasil rencana pembangunan daerah. Evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan tersebut meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi dan dana yang ditetapkan. Evaluasi dilakukan melalui kajian kinerja DPA-PD untuk memastikan pencapaian tujuan indikator kinerja, perolehan modal, kendala yang dihadapi, serta memastikan indikator tersebut terpenuhi. Evaluasi kinerja Renja PD dilakukan setiap triwulan tahun anggaran

berjalan, dan apabila ditemukan ketidaksesuaian/penyimpangan, pengelola PD akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan dan didokumentasikan untuk penyusunan Renja PD tahun berikutnya. Kepala Bappeda wajib mengevaluasi Renja dan memberikan rekomendasi serta langkah perbaikan yang perlu ditindaklanjuti oleh Kepala PD. Selain itu, derajat kohesi dan komitmen pemerintah daerah dan DPRD dalam memperhatikan prioritas kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam alokasi anggaran dapat diukur atau dinilai atas dasar konsistensi tiga dokumen, yaitu RKPD, PPAS, dan APBD.

Konsistensi antara dokumen rencana dan anggaran merupakan hal yang sangat penting sebagai indikator kinerja pemerintah daerah. Hal ini sangat mempengaruhi pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan dan berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti seperti pendidikan dan kesehatan.

Menurut Nursini (2010:66) disebutkan bahwa "Ada dua hal yang dapat diperhatikan untuk menilai konsistensi perencanaan dan penganggaran, yaitu (i) membandingkan isi dokumen RKPD dengan APBD, dan (ii) membandingkan isi dokumen rencana kerja PD dengan RKA/DPA." Keterkaitan antara kebijakan, perencanaan, dan penganggaran perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah agar tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat dan menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Namun, hasil evaluasi studi menunjukkan bahwa beberapa pemerintah daerah belum memahami keterkaitan antara dokumen perencanaan, yang menyebabkan ketidak konsistenan antara pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manokwari merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi dasar di dalam pembuatan RENSTRA dan RENJA bagi setiap Perangkat Daerah. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang sangat penting didalam penyelenggaran pemerintahan. Perencanaan dan penggangaran merupakan proses yang terintegrasi yang mengasilkan output berupa penganggaran. Integrasi diperlukan untuk memadukan proses perencanaan dan penganggaran agar terlaksana secara efektif, efisien dan akuntabel. Untuk itu diperlukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta kegiatan evaluasi, terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk menilai dan memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah telah selaras dengan RPJMD sehingga sasaran pembangunan dapat tercapai secara optimal dan mengevaluasi, menilai, mengidentifikasi setiap program dan kegiatan yang belum terealisasi dengan maksimal serta menjadi bahan evaluasi pada pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dalam Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. Faktor yang mempengaruhi adalah tidak adanya konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran sehingga menyebabkan penyusunan RKPD hanya berpatokan dari RPJMD dan RENSTRA tahun sebelumnya sehingga perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya berkesan *Copy-Paste*. Sehingga penyusnan RKPD pada tahun – tahun berikutnya kurang efektif dan efisien.

Tabel 1. 1.
Presentase Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Manokwari Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2018

Rincian	Target	Realisasi	Presentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Tidak Langsung	560,780,145	526,862,167	93.95
Belanja Langsung	625,087,897	590,656,797	94.49
JUMLAH	**1,185,868,042**	**1,117,518,965**	**94.24**

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari 2018 - 2019

Tabel 1. 2.
Presentase Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Manokwari Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2019

Rincian	Target	Realisasi	Presentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Tidak Langsung	461,305,716	419,425,956	90.92
Belanja Langsung	828,068,272	752,539,348	90.88
JUMLAH	**1,289,373,988**	**1,171,965,304**	**90,89**

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari 2018 - 2019

Berdasarkan tabel 1.1 dan 1.2 terlihat bahwa target belanja (langsung dan tidak langsung) pada tahun 2019 adalah sebesar Rp1.289.373.988 dengan realisasi sebesar Rp1.171.965.304 atau 90,89 persen sementara pada tahun 2018 target belanja belanja (langsung dan tidak langsung) adalah sebesar Rp1.185.868.042 dengan realisasi sebesar Rp1.117.518.965 atau sebesar 94,24 persen. Dari hal tersebut terlihat bahwa terjadi penurunan terhadap target dan realisasi pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018. Oleh karena itu diperlukan adanya monitoring dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran agar kondisi seperti diatas dapat berubah dan target dan realisasi yang direncanakan pada tahun berikutnya dapat tercapai secara optimal (meningkat)

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau evaluasi rencana kerja kerja pemerintah daerah (RKPD) dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dari beberapa wilayah pemerintah daerah merupakan pedoman peneliti untuk turun melaksanakan penelitian di Kabupaten Manokwari, Pertama, Dalam jurnal yang ditulis oleh Nofriyanto Triyono, Lintje Kalangi, dan Stanly Alexander Tahun 2019 dengan judul Evaluasi Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah di Provinsi Sulawesi Utara yang melakukan penelitian dengan variable evaluasi dan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dari hasil penelitian tersebut mendapatkan hasil temuan pada program dan kegiatan yang belum konsisten antara perencanaan dan penganggaran. Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Anindita Primastuti pada Tahun 2019 dengan judul Evaluasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Angaran Pendapatan Belanja Daereah (APBD) di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur yang melaksanakan penelitian dengan variabel evaluasi proses dan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dari hasil penelitian permasalahan yang krusial disebabkan oleh proses perencanaan dan penganggaran yang terpisah melalui tahapan yang sangat panjang dan adanya pengaruh perencanaan politis yang lebih kuat daripada perencanaan teknokrat dan partisipasif sehingga membuat ketidaksinkronan dalam dokumen perencanaan. Ketiga, Skripsi yang disusun oleh

Dwienta Januarty pada Tahun 2020 yang berjudul Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan penelitian menggunakan variabel evaluasi dan metode yang dipakai yaitu kualitatif dengan pendekatan *bottom up – planning*, dari hasil penelitian menunjukkan proses penyusunan perencanaan dan penganggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sudah cukup optimal tetapi masih terdapat kelemahan yaitu kurangnya koordinasi di antara sub-bagian dan sub-bidang serta tingkat konsistensi dokumen perencanaan anggaran sudah tinggu dan sesuai, tapi dalam penyerapan realisasi keuangannya belum optimal. Persamaan pada penelitian diatas menggunakan metode penelitian kualitatif dan teori evaluasi, sedangkan perbedaannya terdapat pada lokus penelitian.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni mengevaluasi RKPD dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Manokwari belum konsisten, dan hasilnya dapat dijadikan acuan untuk perbaikan terhadap pemerintah daerah di Kabupaten Manokwari kedepannya. Penelitian ini nantinya menggunakan Evaluasi CIPP dengan 4 (empat) dimensi yaitu : *Context, Input, Process, and Product.* Selain itu penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan teknik pengumpulan data menggunakan 3 (tiga) teknik yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dalam Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat terdapat keselarasan antara dokumen perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan RKPD.

II. METODE (5-10%)

Penulis pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan induktif. Peneliti menyajikan data RKPD dan dokumen perencanaan dan penganggaran yang kemudian dianalisis dalam bentuk deskripsi. Data yang digunakan tidak ditampilkan sebagai penguji teori maupun hipotesis sebagaimana data statistik pada penelitian kuantitatif. Namun, data statistik yang disajikan tersebut digunakan penulis sebagai bahan untuk menjelaskan keadaan atau gambaran objek yang diteliti. Williams dalam Hardani (2020:17-18) Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif berlangsung di lingkungan alami atau sesuai dengan kondisi alamiah (Natural Setting). Ilmuwan menjadi alat terpenting dalam mengumpulkan dan menganalisis data, memperhatikan proses yang berlangsung, termasuk interaksi antara variabel lingkungan dan individu. Metode analisis yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif adalah analisis induktif, yang dapat digunakan untuk menemukan masalah dan topik penelitian yang baru dan penting. Penelitian kualitatif juga melibatkan triangulasi data yang luas. Dalam penelitian kualitatif, pengambilan sampel biasanya dilakukan melalui purposive sampling.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian evaluasi, yaitu suatu prosedur ilmiah yang sistematis yang digunakan untuk mengukur hasil suatu program atau proyek, apakah sesuai dengan tujuan yang direncanakan atau tidak, dan dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan meninjau pelaksanaan program. diselesaikan secara objektif. Sugiyono (2016:41) menjelaskan bahwa "Penelitian ini menggunakan metode evaluasi, yaitu suatu metode ilmiah yang sistematis untuk mengukur hasil suatu program atau proyek, yang bertujuan untuk menilai apakah program tersebut

berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau tidak, dan dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis dan menganalisis pelaksanaan program secara keseluruhan.
Penulis dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu informasi dasar diperoleh melalui kuisioner/informan yang diberikan kepada karyawan SPI sebagai responden, observasi tempat dan lokasi penelitian, serta wawancara dengan orang-orang terdekat. Kemudian, sumber data sekunder yang dipakai penulis yaitu menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, literatur, jurnal atau laporan ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumen yang diperlukan penulis dalam penelitian ini adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2018 – 2022, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kabupaten Manokwari Tahun 2019 – 2022, Ringkasan Laporan Penyelengggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2020 – 2022, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2020 – 2022, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2021 – 2026. Dokumentasi foto kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaranm, serta dokumentasi – dokumentasi yang dianggap layak untuk penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN (60-70%)

Hasil penelitian ini membahas mengenai deskripsi serta analisis data yang diperoleh peneliti pada koleksi primer dan sekunder yang dilakukan di lapangan. Data utama penelitian ini adalah hasil wawancara dengan orang dalam. Data tersebut merupakan data utama dalam analisis, dilengkapi dengan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen terkait untuk memperkuat dan memperdalam hasil analisis. Hasil penelitian tersebut menjelaskan Evaluasi RKPD dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Manokwari, hambatan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta upaya pemerintah dalam pemerintah dalam mengatasi hambatan tersebut untuk mencapai konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat.

3.1. Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dalam Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran di kabupaten Manokwari

Sebagai sebuah dokumen perencanaan yang penting, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunan daerah yang dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Evaluasi RKPD sangat penting dalam memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran yang dilakukan pemerintah daerah sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan daerah serta mengukur sejauh mana pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam konteks Kabupaten Manokwari di Provinsi Papua Barat, evaluasi RKPD dapat dilakukan dengan melihat beberapa aspek, di antaranya adalah:

1. Konsistensi antara RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya
   Evaluasi RKPD harus memastikan bahwa dokumen ini konsisten dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), dan dokumen perencanaan lainnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa rencana pembangunan daerah yang disusun memiliki fokus dan tujuan yang jelas.
2. Kesesuaian RKPD dengan potensi dan kebutuhan daerah
   Evaluasi RKPD harus mempertimbangkan potensi dan kebutuhan daerah Kabupaten Manokwari. Potensi dan kebutuhan ini harus teridentifikasi secara jelas, sehingga RKPD yang disusun dapat mengakomodasi potensi dan kebutuhan tersebut dengan tepat.
3. Kualitas indikator kinerja dan target yang ditetapkan

Evaluasi RKPD harus memastikan bahwa indikator kinerja dan target yang ditetapkan dalam RKPD memiliki kualitas yang baik dan terukur dengan jelas. Indikator kinerja dan target yang jelas akan memudahkan dalam mengukur pencapaian kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan.

4. Keterlibatan masyarakat dan stakeholder dalam penyusunan RKPD
   Evaluasi RKPD juga harus mempertimbangkan keterlibatan masyarakat dan stakeholder dalam penyusunan dokumen ini. Keterlibatan ini penting untuk memastikan bahwa RKPD yang disusun sudah mempertimbangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat dan stakeholder.
5. Konsistensi antara RKPD dan anggaran
   Evaluasi RKPD harus memastikan bahwa RKPD dan anggaran yang disusun konsisten dan saling mendukung. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD.

RKPD sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan pedoman yang menjadi kunci keberhasilan dalam proses perencanaan dan kinerja pengelolaan keuangan. Penyusunan rencana yang baik memeiliki tahapan panjang yang melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintahan kabupaten. Rencana dan penganggaran merupakan proses integrasi yang memiliki hubungan yang erat. Dengan adanya sinergi perencanaan dan penganggaran maka Outcome dan Impact yang dihasilkan akan lebih optimal. Hubungan antara perencanaan dan penganggaran digambarkan sebagai berikut:

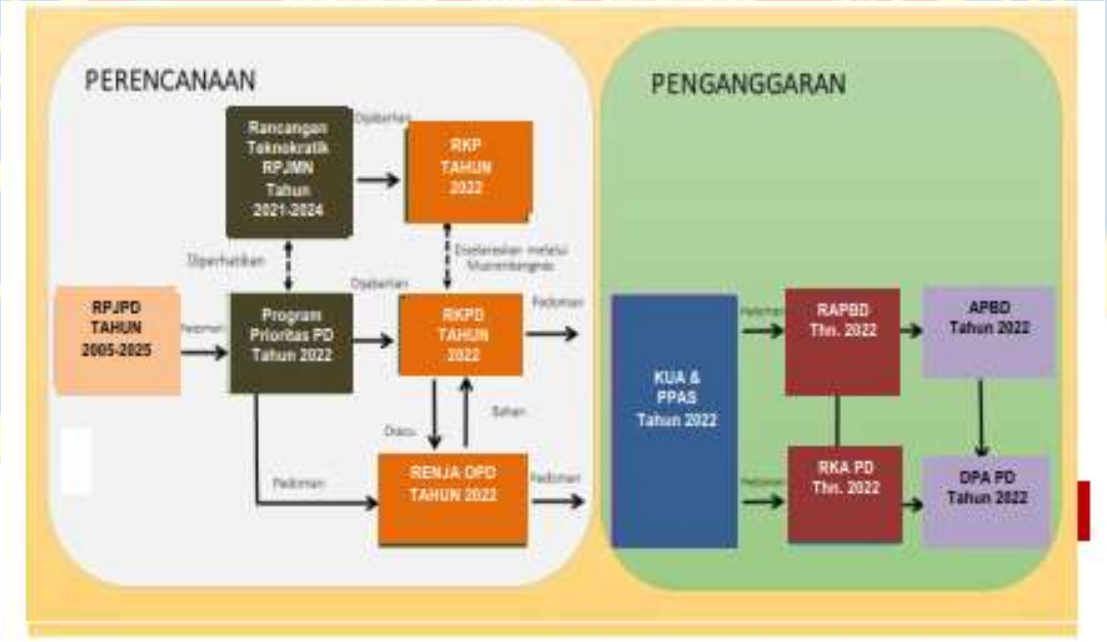

Dokumen perencanaan yang berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)/(Otonomi Khusus), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daereah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang masing – masingnya mempunyai jangka waktu tertentu yaitu dua puluh tahun, lima tahun dan satu tahun, yang kerap kali ditemukan ketidaknyambungan (Unmatch). Hal ini dikarenakan sering ditemukannya bahwa ada kecenderungan dokumen RPJP ataupun RPJM/Renstra-PD sering kali tidak dijadikan patokan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran. Hal ini disebabkan belum optimalnya kualitas dan kuantitas

tenaga perencanaan PD. Sebagai contoh, pada saat penyusunanan dokumen para penyusun merupakan seorang pengguna anggaran dan bendahara serta kurang mengikutsertakan staff program perencanaan sehingga banyaknya saran kegiatan yang sifatnya menyalin (Copy-Paste) sehingga penyusunan yang monoton dan tidak visioner. RPJPD dan RPJMD serta Renstra-PD masih belum optimal.
Di Kabupaten Manokwari sendiri, siklus perencanaan dan penganggaran tahunan melewati fase yang cukup panjang, dimana proses perencanaan dimulai pada musrenbang tingkat kampung/kelurahan kemudian dilanjutkan pada tingkat musrenbang Distrik. Berdasarkan RKPD, Kepala daerah menyusun rencana aksi umum APBD. Rancangan kebijakan umum APBD yang dibahas oleh Kepala Daerah dengan DPRD kemudian disepakati dalam Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan kebijakan umum APBD yang disepakati, pemerintah Kabupaten Manokwari dan DPRD membahas prioritas dan pagu anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan oleh Kepala daerah. Kemudian pimpinan daerah memberikan arahan penyusunan RENJA dan (RKA) PD sebagai arahan kepada pimpinan PD untuk penyusunan RKA - PD berdasarkan Penjabaran. Setelah penyusunan RKA-PD, langkah selanjutnya adalah Perda APBD dan garis besar pengurus daerah tentang penyusunan APBD. Rencana regulasi tersebut kemudian dievaluasi dan pengelola daerah memutuskan penyusunan APBD. Kabupaten Manokwari juga melakukan siklus perencanaan dan penganggaran di atas. Namun mengingat banyaknya rencana pembangunan yang harus dilakukan pemerintah Kabupaten Manokwari dengan anggaran yang terbatas, maka disusun program prioritas agar tujuan pemerintah tercapai secara bertahap.

A. Dimensi Konteks

Konsistensi dan keselarasan dokumen perencanaan dan anggaran dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Manokwari Tahun 2022 sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, oleh karena itu konsistensi menitikberatkan pada keselarasan antara dokumen rencana dan program. Disusun dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di RKPD serta Juga memedomani keterkaitan antara dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun dalam RKPD.
Hasil evaluasi dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2022 dengan RKPD Kabupaten Manokwari dapat memberikan informasi penting sejauh mana kebijakan dan program pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kebijakan yang dijadikan acuan RKPD adalah Peraturan Bupati Manokwari Nomor 14 Tahun 2017. Penilaian ini dapat membantu mengidentifikasi kelemahan atau kesenjangan dalam perencanaan dan penganggaran yang dapat diubah atau diperbaiki untuk memastikan bahwa dokumen perencanaan dan penganggaran konsisten dengan RKPD.

B. Dimensi Input

Kriteria evaluasi merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu program dan kegiatan. Oleh karena itu, untuk melakukan evaluasi diperlukan informasi yang akurat dan terpercaya tentang pelaksanaan program dan kegiatan yang dievaluasi. Metode evaluasi juga harus digunakan sesuai dengan tujuan evaluasi, kriteria evaluasi dan informasi yang tersedia. Hal ini membutuhkan tim evaluasi yang terdiri dari para ahli di bidang yang relevan dan pemangku kepentingan yang diperlukan untuk melakukan evaluasi yang tepat. Evaluasi juga memerlukan perencanaan atau rencana evaluasi yang jelas dan terstruktur yang menjamin kinerja evaluasi yang sistematis dan efisien. Pemangku kepentingan program dan kegiatan yang dievaluasi juga dilibatkan dalam proses evaluasi. Terdapat juga tim evaluasi sebagai berikut :

1. Tim evaluasi internal PD yang terdiri dari pegawai yang memiliki pengalaman dan pengetahuan di bidang yang dievaluasi. Tugas kelompok ini biasanya untuk mengevaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh PD.
2. Tim evaluasi eksternal adalah pihak PD yang independen dan mandiri, yang bertugas mengevaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh PD. Kelompok ini dapat terdiri dari konsultan atau lembaga yang memiliki kualifikasi dan pengalaman di bidang yang dinilai.
3. Auditor atau pengawas keuangan, yang bertugas mengevaluasi pengelolaan keuangan dan kinerja keuangan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh PD.
4. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam program dan kegiatan yang dianalisis, seperti masyarakat, perwakilan lembaga swadaya masyarakat dan peneliti yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang yang dianalisis.

   Evaluasi juga membutuhkan sejumlah besar informasi, data, dan dokumen, termasuk:
   1. Informasi tentang program dan kegiatan yang akan dievaluasi
   2. Informasi tentang anggaran dan dana yang tersedia
   3. Dokumen perencanaan dan anggaran terkait program dan kegiatan yang dievaluasi, seperti RKPD, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan dokumen perencanaan lainnya.
   4. Laporan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya, antara lain laporan keuangan, laporan operasional dan laporan evaluasi pendahuluan.
   5. Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan sebelumnya
   6. Informasi tentang pemangku kepentingan yang terlibat dalam program dan kegiatan yang dievaluasi.
   7. Informasi terkait dari sumber eksternal

Untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan evaluasi, PD harus menyampaikan dokumen persyaratan tepat waktu dan dokumen yang diperlukan sebelum evaluasi dimulai, seperti laporan program dan kegiatan, RKA dan dokumen perencanaan lainnya.

C. Dimensi Proses

Proses evaluasi terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran dilakukan secara berkala dan terjadwal. Biasanya, evaluasi dilakukan pada saat-saat tertentu dalam siklus perencanaan dan penganggaran, seperti:

a. Kajian pendahuluan: Dilakukan sebelum penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk memastikan terpenuhinya RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).
b. Evaluasi tengah tahun: dilakukan pada pertengahan tahun anggaran untuk mengevaluasi kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan serta mengevaluasi penggunaan anggaran secara berkala.
c. Evaluasi akhir tahun: dilakukan pada akhir tahun anggaran untuk mengevaluasi kinerja dan penggunaan anggaran selama satu tahun anggaran.
d. Evaluasi akhir periode: Dilakukan setelah akhir siklus perencanaan dan penganggaran untuk mengevaluasi keseluruhan hasil pelaksanaan program dan kegiatan serta menilai kesesuaian dengan persyaratan RPJMD dan RKPD.

Proses evaluasi program dan kegiatan pemerintah didasarkan pada beberapa landasan hukum yang mengatur tata kelola pemerintahan, seperti:

1. UU No 25 Tahun 2004
2. UU No 17 Tahun 2003
3. PP No 58 Tahun 2005
4. PP No 71 Tahun 2010
5. PP No 17 Tahun 2021

Tujuan evaluasi dokumen perencanaan dan anggaran adalah untuk memastikan pelaksanaan rencana dan program dan kegiatan yang sebenarnya serta penggunaan anggaran yang efektif, efisien, dan transparan.

Berdasarkan wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa tujuan evaluasi seperti berikut:

a. Mengevaluasi pencapaian kinerja
b. Memastikan akuntabilitas:
c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas:
d. Mengidentifikasi masalah dan solusi:
e. Meningkatkan partisipasi masyarakat

Dalam mengevaluasi sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan telah tercapai, maka dokumen perencanaan seperti RKPD, Renja - PD, Renstra dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dapat dijadikan bahan evaluasi. Informasi pelaksanaan, seperti laporan pelaksanaan kegiatan, laporan keuangan, laporan pertanggungjawaban, dan data pemantauan dan evaluasi, dapat digunakan sebagai masukan untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Kami juga menerima umpan balik dari masyarakat, seperti hasil survei, laporan pengaduan dan partisipasi masyarakat, yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menilai keberhasilan program dan kegiatan dalam memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut tentunya kami juga memiliki standar dan indikator kinerja yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk menilai efektivitas program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. analisis pembandingan merupakan alat yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk membandingkan kinerja program dan kegiatan dengan program dan kegiatan serupa di daerah atau lembaga lain untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan meningkatkan efektivitas program dan kegiatan Ada beberapa tahap dilaksanakannya evaluasi seperti berikut :

a. Perencanaan
b. Pengumpulan data
c. Analisis data
d. Penilaian
e. Pelaporan hasil evaluasi

Durasi proses evaluasi dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas program atau kegiatan yang dievaluasi dan jumlah data yang dikumpulkan dan dianalisis. Namun secara umum, proses evaluasi berlangsung dalam jangka panjang dan terstruktur.

Beberapa hal yang dapat menjadi penghambat dalam proses evaluasi antara lain:

a. Kurangnya dukungan dan komitmen pengelola PD atau pengelola daerah terhadap proses evaluasi yang dilakukan.
b. Kurangnya sumber daya manusia, keuangan dan sumber daya teknis yang diperlukan untuk melaksanakan penilaian secara efektif dan efisien.
c. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang dievaluasi.
d. Kurangnya informasi yang lengkap dan akurat tentang pelaksanaan program atau kegiatan yang dievaluasi.
e. Munculnya benturan kepentingan atau penilaian yang tidak memihak dari pihak yang melakukan penilaian.
f. Terdapat hambatan teknis dalam pelaksanaan evaluasi, seperti kesulitan dalam pengukuran kinerja, analisis data yang rumit atau kesulitan dalam mengembangkan indikator evaluasi yang tepat.

g. Selama proses evaluasi, dilakukan perubahan kebijakan atau program yang dapat mempengaruhi hasil evaluasi sebelumnya.

Komunikasi dan koordinasi yang baik antara tim evaluasi dengan pimpinan PD atau pimpinan daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendapatkan dukungan dan komitmen dalam melakukan evaluasi. Serta mengembangkan keterampilan dan kemampuan teknis tim evaluasi dalam melakukan evaluasi, seperti pengumpulan data, analisis data, dan pengembangan indikator evaluasi yang sesuai. Pemilihan metode asesmen yang tepat juga perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, serta mengembangkan alat asesmen yang efektif dan efisien. Tim evaluasi juga harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang dievaluasi untuk memudahkan pengumpulan informasi yang diperlukan. Pemilihan metode evaluasi yang objektif dan terukur secara kuantitatif dan kualitatif, sehingga hasil evaluasi yang diperoleh dapat dipercaya dan objektif. Peningkatan komunikasi dan koordinasi antara tim evaluasi dan otoritas dalam mengevaluasi keputusan yang dibuat atas rekomendasi terkait hasil evaluasi dan pada akhirnya mengidentifikasi perubahan kebijakan atau program yang terjadi selama proses evaluasi dan dampaknya terhadap hasil evaluasi.

D. Dimensi Produk

Hasil evaluasi RKPD dapat menjadi masukan berharga bagi setiap PD dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran. Berdasarkan hasil evaluasi, PD dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat diperbaiki dan ditingkatkan efektivitasnya di masa yang akan datang. Dari proses evaluasi terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran, beberapa jenis laporan yang dihasilkan antara lain:

a. Laporan hasil evaluasi
b. Laporan pemantauan:
c. Laporan akhir
d. Laporan monitoring

Untuk mengetahui capaian kinerja dan realisasi anggaran dari setiap PD, diperlukan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber, seperti:

a. Laporan keuangan
b. Laporan pelaksanaan program dan kegiatan
c. Laporan monitoring dan evaluasi
d. Survei atau studi lapangan

3.2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Evaluasi RKPD Terhadap Perencanaan dan Penganggaran

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang dilapangan peneliti dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor penghambat pelaksanaan evaluasi RKPD di Kabupaten Manokwari sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia yang terbatas: evaluasi RKPD membutuhkan sumber daya manusia dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai di bidang evaluasi program. Namun, jika ada kekurangan tenaga ahli pada sektor penilaian di daerah tersebut, pelaksanaan penilaian RKPD bisa menjadi sulit.
2. Sumber keuangan yang terbatas: Evaluasi RKPD membutuhkan dana yang tidak sedikit, terutama jika daerah tersebut memiliki wilayah yang luas atau program yang kompleks. Pelaksanaan penilaian RKPD mungkin sulit dilakukan jika dana di daerah kurang.
3. Kurangnya kesadaran dan partisipasi pemangku kepentingan: Penilaian RKPD membutuhkan dukungan dan partisipasi berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat dan sektor swasta. Jika para pemangku kepentingan tersebut tidak menyadari pentingnya penilaian

RKPD atau tidak terlibat aktif dalam pelaksanaannya, maka pelaksanaan penilaian RKPD dapat menjadi sulit.

4. Kendala teknis Teknologi Informasi: Penilaian RKPD memerlukan dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang memadai, seperti sistem informasi manajemen kinerja dan pengawasan (SIMKAP), sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD). Jika sistem mengalami kendala teknis atau kurang terintegrasi, pelaksanaan penilaian RKPD dapat menjadi lebih sulit.
5. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait: Penilaian RKPD membutuhkan koordinasi antar berbagai instansi terkait seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, OPD yang lain. Jika koordinasi tidak baik, misalnya ada tumpang tindih atau tidak jelas, pelaksanaan penilaian RKPD bisa menjadi sulit.

Peneliti menyimpulkan seharusnya Pemerintah Kabupaten Manokwari perlu upaya yang serius dari pihak-pihak terkait untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut agar evaluasi RKPD dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan masukan yang berkualitas untuk perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Manokwari.

3.3. Upaya Pemerintah Untuk Mengatasi Faktor Penghambat Terhadap Proses Evaluasi RKPD Dalam Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang dilapangan peneliti dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa upaya untuk mengatasi faktor penghambat proses pelaksanaan evaluasi RKPD di Kabupaten Manokwari sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia: Pemerintah Kabupaten Manokwari dapat memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi staff yang terlibat dalam penilaian RKPD. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, seminar atau lokakarya tentang evaluasi program, manajemen kinerja dan evaluasi kebijakan.
2. Peningkatan Alokasi Anggaran Penilaian RKPD: Pemerintah Kabupaten Manokwari dapat meningkatkan alokasi anggaran penilaian RKPD untuk meningkatkan kebutuhan sumber daya seperti biaya pelatihan, dana untuk tenaga ahli penilaian dan biaya operasional penilaian.
3. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Pemangku kepentingan: Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemangku kepentingan seperti masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan pihak terkait lainnya dalam proses penilaian RKPD. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat komunikasi dan transparansi proses evaluasi sehingga pemangku kepentingan memahami dan berpartisipasi dalam proses evaluasi RKPD.
4. Peningkatan Dukungan Teknologi Informasi: Pemerintah Kabupaten Manokwari dapat meningkatan dukungan teknologi informasi dalam proses evaluasi RKPD, misalnya meningkatkan kualitas dan integrasi seperti sistem informasi manajemen kinerja dan pengawasan (SIMKAP) dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Dengan solusi mengupdate sistem base dari tiap – tiap media pembantu proses evaluasi RKPD.
5. Peningkatan Koordinasi antar instansi yang lebih baik: Pemerintah Kabupaten Manokwari dapat meningkatkan koordinasi antar instansi yang terlibat dalam proses evaluasi RKPD seperti BAPPEDA, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan OPD lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan komunikasi, memperkuat kerjasama dan membangun mekanisme koordinasi yang jelas dan efektif. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Manokwari harus memprioritaskan kegiatan tersebut agar proses penilaian RKPD dapat berjalan dengan baik dan memberikan informasi yang berkualitas untuk perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Manokwari.

Peneliti menyimpulkan seharusnya Pemerintah Kabupaten Manokwari harus memprioritaskan upaya - upaya tersebut agar proses penilaian RKPD dapat berjalan dengan baik dan memberikan informasi yang berkualitas untuk perencanaan dan penganggaran di tahun yang akan datang.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya peneliti menarik kesimpulan keunggulan penelitian terkait "EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH RKPD DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DI KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT". Peneliti membandingkan setidaknya lima hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan tema yang hampir sama dengan tema yang akan diteliti peneliti pada penelitian ini. Peneliti melakukan perbandingan dan menemukan beberapa persamaan maupun perbedaan antara keduanya. Adanya perbandingan tersebut diharapkan dapat menunjang pelaksanaan penelitian yang dilakukan sehingga penulis memiliki bahan pembanding agar penelitian yang dikaji dapat lebih baik dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

Adapun penelitian ini mengandung unsur novelty atau kebaruan dimana pada penelitian sebelumnya evaluasi terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran yang dilakukan dengan berbagai macam tujuan tertentu. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap RKPD dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran sehingga untuk mengetahui konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran. Oleh karena itu, diharapkan penelitian yang dilakukan penulis dapat menjadi bahan rujukan bagi pemerintah daerah terutama Kabupaten Manokwari dalam mengevaluasi dan menyusun perencanaan dan penganggaran pada tahun anggaran berikutnya.

IV. KESIMPULAN (5-10%)

Penulis menyimpulkan bahwa partisipasi pemuda dalam program lorong literasi di Kelurahan Paccinongang telah berjalan dengan baik dikarenakan adanya kolaborasi yang baik dari pemerintah setempat dengan komunitas pemudanya. Selain memerankan pemuda sebagai kunci berjalannya program, perihal kolaborasi ini menambahkan temuan baru yang memperluas penelitian pada bidang literasi informasi. Guna meningkatkan partisipasi pemuda dalam program lorong literasi, disarankan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial agar mempermudah penyaluran aspirasi serta melakukan sosialisasi/literasi digital kepada masyarakat. Pemerintah setempat juga seyogiannya mampu merangkul dan berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk wirausaha dalam rangka memenuhi kelengkapan fasilitas Program Lorong Literasi di Kelurahan Paccinongang.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu Perangkat Daerah saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan teori yang digunakan

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan kepada rekan – rekan sekiranya dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Evaluasi RKPD dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Manowkari untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada bapak Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manokwari beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini terutama kepada Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing serta Dosen Penguji yang senantiasa telah membimbing peneliti.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Arikunto. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta.

Asmungi, W. Linda. (2022). *Metodelogi Penelitian Sosial.* Bukittingi: IPDN.

Bastian, Indra. (2013). *Akuntansi Sektor Publik Indonesia.* Yogyakarta: Kreasi BPFE.

Basuki. (2008). *Pengelolaan Keuangan Daerah.* Yogyakarta: Kreasi Wacana Yogyakarta.

Dunn. N, Wiliiam. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Samodra Wibawa.

Halim Abdul. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah.* Jakarta: Selemba Empat.

Januarty. (2020). *Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.* Palembang: Universitas Sriwijaya.

Khusaini, Moh. (2018). *Keuangan Daerah.* Malang: UB Press.

Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.* Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Moenek, Reydonnizar dan Dadang Suwanda. (2019). *Good Governmet Pengelolaan Keuangan Daerah.* Bandung: Rosda.

Moleong, Lexy J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mulyadi. (2001). *Sistem Akuntansi: Edisi Ketiga.* Jakarta: Selemba Empat.

Nofriyanto Triyono, Lintje Kalangi, Stanly Alexander. (2019). Evaluasi Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran . *Jurnal EMBA*, Volume 7 No. 3.

Rahajeng, Anggi. (2016). *Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Silalahi, Ulber. (2006). *Metode Penelitian Sosial.* Bandung: UNPAR Press.

Simangungsong, Fernandez dan Sadu Wasistiono. (2015). *Metode Ilmu Pemerintahan.* Bandung: IPDN.

Sugiarto. (2015). Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Anggaran Daerah.

Sugiyono. (2007). *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitafi Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sukandarrumidi. (2006). *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Syamsi, I. (1986). *Pokok - Pokok Kebijaksanaan, Perencanaan, Pemprograman, dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional.* Jakarta: CV. Rajawali.